



Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembuangan Sampah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru 2024

Fionita Syafitri

Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Hang Tuah,
Pekanbaru, Indonesia

fionitasyafitri19@gmail.com

Abstract

Waste management has become an increasingly complex environmental issue in urban areas, including Pekanbaru City, due to the continuous growth of daily waste generation. Although Pekanbaru City Regional Regulation Number 08 of 2014 on Waste Management has been enacted, public compliance in waste disposal remains relatively low. This condition is reflected in the persistence of waste disposal outside designated hours and the proliferation of illegal dumping sites, particularly in Marpoyan Damai District. This study aims to analyze factors associated with community compliance in waste disposal in Marpoyan Damai District, Pekanbaru City, in 2024. A quantitative approach was employed using an observational analytic design with a cross sectional method. The study population comprised residents of Tengkerang Barat Village totaling 22,599 individuals, from which 100 respondents were selected through random sampling. Data were collected using a structured questionnaire administered through interviews and analyzed using univariate and bivariate analyses with the Chi Square test. The findings indicate that education level and the role of government or community leaders are significantly associated with community compliance in waste disposal. Conversely, knowledge level, income level, and the availability of facilities and infrastructure show no significant relationship with compliance behavior. In conclusion, community compliance in waste disposal is primarily influenced by structural and social factors, particularly educational background and the effectiveness of local authority involvement. Strengthening continuous environmental education and consistent enforcement of waste management policies is therefore essential to improve public compliance.

Keywords: *Community compliance; Environmental behavior; Public policy; Waste management; Pekanbaru.*

Abstrak

Pengelolaan sampah merupakan permasalahan lingkungan perkotaan yang semakin kompleks, termasuk di Kota Pekanbaru, seiring dengan meningkatnya volume sampah harian. Meskipun telah diberlakukan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah masih tergolong rendah. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di luar jam operasional yang telah ditetapkan serta maraknya keberadaan Tempat Pembuangan Sampah ilegal, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analitik *observational cross sectional*. Populasi penelitian adalah masyarakat Kelurahan Tengkerang Barat dengan jumlah 22.599 jiwa, sedangkan sampel

Article info

Received 12 Desember 2025

Revised 18 Desember 2025

Accepted 23 Desember 2025

fionitasyafitri19@gmail.com

Copyright©2025. Published by Jurnal Prima Manajemen – Al -Afif

penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik *random sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner melalui metode wawancara, kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan uji *Chi Square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan peran pemerintah atau tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah. Sementara itu, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, serta ketersediaan sarana dan prasarana tidak menunjukkan hubungan yang signifikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah dipengaruhi oleh faktor struktural dan sosial, khususnya latar belakang pendidikan serta efektivitas peran otoritas lokal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan edukasi berkelanjutan dan penegakan kebijakan yang konsisten guna meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan masyarakat; Pengelolaan sampah; Perilaku lingkungan; Kebijakan publik; Pekanbaru.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah hingga saat ini masih menjadi isu lingkungan yang krusial dan bersifat multidimensional, baik di negara berkembang maupun negara maju. Sampah tidak hanya dipandang sebagai persoalan teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, perilaku, kebijakan publik, serta penegakan hukum. *World Health Organization (WHO)* (*World Health Organization*, 2016) mendefinisikan sampah sebagai segala sesuatu yang tidak lagi digunakan, tidak diinginkan, atau merupakan sisa aktivitas manusia yang dibuang (Citron, 2023). Definisi tersebut menegaskan bahwa sampah merupakan konsekuensi langsung dari aktivitas manusia sehari-hari, sehingga pengelolaannya sangat dipengaruhi oleh perilaku dan kepatuhan masyarakat sebagai produsen utama sampah.

Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, permasalahan sampah juga menunjukkan tren yang semakin kompleks. Pertambahan jumlah penduduk, urbanisasi, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya pola konsumsi masyarakat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan volume dan variasi jenis sampah yang dihasilkan. (Manik, 2021) menyatakan bahwa timbulan sampah di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, tingkat aktivitas ekonomi, jenis kegiatan masyarakat, serta pola konsumsi yang berkembang. Apabila tidak diimbangi dengan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan perilaku masyarakat yang patuh terhadap aturan, maka sampah berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, penurunan kualitas kesehatan masyarakat, serta terganggunya estetika dan kenyamanan lingkungan perkotaan.

Di Indonesia, pengelolaan sampah telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini menegaskan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah, dari pendekatan konvensional kumpul angkut buang (*end of pipe*) menuju pendekatan pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip *3R*, yaitu *reduce*, *reuse*, dan *recycle*. Prinsip *reduce* menekankan pada upaya pengurangan timbulan sampah sejak awal, *reuse* mendorong penggunaan kembali barang yang masih memiliki nilai guna, sedangkan *recycle* berfokus pada proses daur ulang sampah menjadi produk yang bermanfaat. Keberhasilan penerapan prinsip *3R* sangat bergantung pada tingkat kesadaran, pengetahuan, dan kepatuhan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah sesuai ketentuan (Hellen, 2020).

Sebagai bagian dari implementasi kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru menetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini mengatur secara rinci ruang lingkup pengelolaan sampah yang mencakup sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga,

dan sampah spesifik. Selain itu, peraturan daerah ini juga menetapkan larangan membuang sampah di jalan raya, tempat umum, dan kawasan permukiman, serta mengatur jam operasional pembuangan sampah yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, peraturan tersebut dilengkapi dengan sanksi pidana berupa denda hingga Rp2.500.000,00 bagi pihak yang melanggar ketentuan pembuangan sampah (Oswari, 2019).

Meskipun regulasi telah disusun secara jelas dan sanksi telah ditetapkan, permasalahan utama yang masih dihadapi adalah lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai aturan. Berdasarkan pantauan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kota Pekanbaru, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di luar jam operasional yang telah ditetapkan, yaitu antara pukul 19.00 hingga 05.00 WIB. Selain itu, masih sering dijumpai tumpukan sampah di tepi jalan dan di area yang tidak diperuntukkan sebagai tempat pembuangan sampah. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan perilaku nyata masyarakat di lapangan.

Kondisi tersebut juga mencerminkan belum optimalnya efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014. (Rahman, 2019) mengemukakan bahwa lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan yang konsisten, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama yang menyebabkan kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan secara maksimal. Dalam konteks ini, kepatuhan masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan dan sanksi, tetapi juga oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan sarana dan prasarana, intensitas sosialisasi kebijakan, serta persepsi masyarakat terhadap peran dan komitmen pemerintah.

Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu wilayah di Kota Pekanbaru yang menghadapi permasalahan pengelolaan sampah cukup serius. Berdasarkan data (BPS Kota Pekanbaru, 2022), Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas wilayah $\pm 29,79$ km² dengan jumlah penduduk mencapai 132.002 jiwa. Kepadatan penduduk yang relatif tinggi berdampak langsung pada tingginya volume sampah yang dihasilkan setiap hari. Data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Kecamatan Marpoyan Damai termasuk dalam zona 1 dengan rata-rata timbunan sampah mencapai 130.409 ton per tahun. Namun, tingginya volume sampah tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai.

Secara operasional, pengangkutan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai dilakukan dalam dua shift, yaitu pagi hari pukul 05.00–10.00 WIB dan siang hari pukul 11.00–17.00 WIB. Sementara itu, jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang tersedia hanya delapan unit untuk seluruh wilayah kecamatan. Keterbatasan jumlah TPS ini menjadi salah satu faktor yang mempersulit masyarakat untuk membuang sampah pada tempat dan waktu yang telah ditentukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan dengan akses TPS yang jauh atau tidak tersedia sama sekali (Putra, 2020).

Permasalahan pengelolaan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai terlihat lebih nyata di Kelurahan Tengkerang Barat. Kelurahan ini hingga saat ini belum memiliki TPS legal yang disediakan oleh pemerintah, sehingga masyarakat cenderung membuang sampah di lokasi-lokasi tidak resmi, seperti di tepi jalan atau lahan kosong. Kondisi ini memicu munculnya TPS ilegal yang tidak terkelola dengan baik. Ketidakterediaan sarana, jadwal pengangkutan yang tidak konsisten, serta minimnya pengawasan menjadi faktor pendorong terjadinya perilaku pembuangan sampah sembarangan. Sampah yang menumpuk dan tidak tertangani dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit berbasis lingkungan, serta menurunkan kualitas lingkungan hidup masyarakat sekitar (Oswari, 2019).

Dalam perspektif perilaku kesehatan dan lingkungan, kepatuhan masyarakat merupakan hasil interaksi antara faktor individu dan faktor lingkungan. Pengetahuan dan

sikap masyarakat terhadap pengelolaan sampah, persepsi terhadap risiko kesehatan dan lingkungan, ketersediaan fasilitas, serta ketegasan penegakan hukum merupakan faktor-faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi perilaku pembuangan sampah (Putra, 2020). Oleh karena itu, permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan struktural melalui penyediaan fasilitas dan regulasi, tetapi juga memerlukan pendekatan perilaku yang berfokus pada peningkatan kepatuhan masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah, namun sebagian besar masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengkaji konteks lokal di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selain itu, perubahan dinamika sosial, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kebijakan daerah menuntut adanya pembaruan data dan kajian empiris yang relevan dengan kondisi terkini (Napis Ifikti, 2020). Hal ini menunjukkan adanya *gap* penelitian yang perlu diisi, khususnya terkait identifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah pada tingkat kecamatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan. Penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kepatuhan masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian perilaku masyarakat dan kebijakan pengelolaan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi pemerintah daerah sebagai dasar perumusan strategi dan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORI

Kajian teori dalam penelitian ini disusun untuk memberikan landasan konseptual dan teoritis yang kuat dalam menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah. Kerangka teoritis yang digunakan mencakup konsep pengelolaan sampah, kepatuhan masyarakat, teori perilaku, serta temuan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penelitian ini memiliki posisi ilmiah yang jelas dan terarah.

Secara konseptual, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang sudah tidak digunakan lagi (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008). *WHO* memandang sampah sebagai material yang tidak diinginkan dan dibuang karena tidak memiliki nilai guna bagi pemiliknya (Citron, 2023). Dalam konteks perkotaan, sampah umumnya berasal dari aktivitas rumah tangga, kegiatan ekonomi, dan fasilitas umum. Pengelolaan sampah yang tidak optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta masalah sosial yang berkelanjutan.

Pengelolaan sampah modern menekankan pada prinsip *3R* (*reduce, reuse, recycle*) sebagai pendekatan berkelanjutan. *Reduce* bertujuan menekan timbulan sampah sejak dari sumbernya, *reuse* mendorong pemanfaatan kembali barang yang masih layak pakai, sedangkan *recycle* mengarahkan sampah untuk diolah kembali menjadi produk bernilai guna. Menurut (Glanz, 2020), keberhasilan penerapan prinsip *3R* sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat, terutama dalam memilah dan membuang sampah secara benar. Dengan demikian, aspek kepatuhan masyarakat menjadi elemen kunci dalam sistem pengelolaan sampah yang efektif.

Kepatuhan masyarakat dapat diartikan sebagai tingkat kesediaan individu atau kelompok untuk mematuhi aturan, norma, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Dalam konteks kebijakan publik, kepatuhan dipengaruhi oleh

kesadaran hukum, persepsi terhadap manfaat aturan, serta ancaman sanksi yang diberikan (Becker, 1968). Kepatuhan dalam pembuangan sampah mencerminkan sejauh mana masyarakat membuang sampah sesuai tempat, waktu, dan ketentuan yang berlaku. Rendahnya kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, sikap yang tidak mendukung, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (Rahman, 2019).

Teori perilaku menjadi landasan penting dalam menjelaskan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Salah satu teori yang relevan adalah *Theory of Planned Behavior (TPB)* yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks pembuangan sampah, sikap masyarakat terhadap kebersihan lingkungan, tekanan sosial dari lingkungan sekitar, serta persepsi kemudahan atau kesulitan dalam membuang sampah pada tempatnya akan mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Apabila masyarakat memiliki sikap positif, dukungan sosial yang kuat, dan fasilitas yang memadai, maka kepatuhan cenderung meningkat.

Selain *TPB*, teori *Health Belief Model (HBM)* juga relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. *HBM* menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh persepsi terhadap kerentanan dan tingkat keparahan suatu masalah, persepsi manfaat tindakan, serta hambatan yang dirasakan (Notoatmodjo, 2017). Dalam konteks sampah, masyarakat yang menyadari risiko kesehatan akibat lingkungan kotor cenderung lebih patuh dalam membuang sampah dengan benar. Sebaliknya, apabila risiko tersebut dianggap rendah, maka kepatuhan juga cenderung menurun.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor pengetahuan memiliki hubungan signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Penelitian oleh (Mubarak, 2020) menemukan bahwa masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang baik mengenai dampak sampah terhadap kesehatan dan lingkungan cenderung memiliki perilaku pembuangan sampah yang lebih tertib. Selain pengetahuan, sikap dan kesadaran lingkungan juga berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Sikap positif terhadap kebersihan lingkungan mendorong individu untuk berperilaku sesuai aturan, meskipun pengawasan tidak dilakukan secara langsung.

Faktor eksternal seperti ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi determinan utama kepatuhan masyarakat. Penelitian oleh (Hellen, 2020) menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah TPS, jarak TPS yang jauh dari pemukiman, serta jadwal pengangkutan yang tidak konsisten menjadi penyebab utama masyarakat membuang sampah sembarangan. Kondisi ini menegaskan bahwa kepatuhan tidak hanya bergantung pada faktor individu, tetapi juga pada dukungan struktural dari pemerintah daerah.

Penegakan hukum dan sanksi turut mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat. Menurut teori *deterrence*, keberadaan sanksi yang tegas dan konsisten dapat menekan perilaku menyimpang (Becker, 1968). Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa sanksi saja tidak cukup apabila tidak diiringi dengan sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan represif dan preventif menjadi strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan uraian tersebut, posisi teoritis penelitian ini memandang kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, sikap, dan persepsi risiko, sedangkan faktor eksternal mencakup ketersediaan fasilitas, peran pemerintah, serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini menempatkan diri pada perspektif perilaku dan kebijakan publik, dengan menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah, khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analitik *observational cross-sectional*. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara sejumlah faktor dengan tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah secara objektif dan terukur. Desain *cross-sectional* memungkinkan peneliti melakukan pengukuran variabel independen dan variabel dependen secara bersamaan pada satu waktu tertentu, sehingga dapat menggambarkan kondisi kepatuhan masyarakat serta faktor-faktor yang berhubungan dengannya pada periode penelitian yang sama. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan lokasi penelitian difokuskan pada Kelurahan Tengkerang Barat. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada tingginya permasalahan pembuangan sampah sembarangan dan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) ilegal di wilayah tersebut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2024, menyesuaikan dengan kondisi aktual pengelolaan sampah dan aktivitas masyarakat setempat.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan jumlah penduduk sebanyak 22.599 jiwa. Mengingat besarnya jumlah populasi dan keterbatasan sumber daya penelitian, maka dilakukan penarikan sampel sebagai wakil dari populasi. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih dari masyarakat yang teridentifikasi membuang sampah di TPS ilegal atau membuang sampah tidak sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu pukul 19.00–05.00 WIB. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*, dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi anggota populasi untuk terpilih sebagai responden, sehingga dapat meminimalkan bias dalam pengambilan sampel dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur. Kuesioner disusun berdasarkan indikator-indikator dari masing-masing variabel penelitian dan telah disesuaikan dengan konteks pengelolaan sampah di wilayah perkotaan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap setiap pertanyaan serta meningkatkan keakuratan data yang diperoleh. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan tentang pengelolaan sampah, tingkat pendapatan, peran pemerintah dan tokoh masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Variabel dependen yang diteliti adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan analisis statistik. Analisis univariat dilakukan untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi masing-masing variabel penelitian dalam bentuk frekuensi dan persentase. Selanjutnya, analisis bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Uji statistik yang digunakan dalam analisis bivariat adalah uji *Chi-Square*, karena data yang dianalisis bersifat kategorik. Tingkat kemaknaan statistik ditetapkan pada nilai $\alpha = 0,05$. Hubungan antar variabel dinyatakan signifikan apabila nilai p lebih kecil dari 0,05. Melalui tahapan analisis ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian serta pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru

tahun 2024. Penyajian hasil penelitian didasarkan pada analisis data yang diperoleh dari 100 responden, kemudian dianalisis secara bivariat untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis statistik dengan teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan.

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diperoleh melalui uji bivariat antara faktor-faktor yang diteliti dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah. Variabel independen yang dianalisis meliputi tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, peran pemerintah atau tokoh masyarakat, serta ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Hasil uji statistik disajikan dalam bentuk tabel untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antar variabel.

Tabel 4.1 Hasil Uji Hubungan Faktor-Faktor dengan Kepatuhan Masyarakat dalam Pembuangan Sampah (n = 100)

Variabel Independen	<i>P-value</i>	Keterangan	<i>POR</i> (<i>Odds Ratio</i>)	Kepatuhan
Pendidikan	0,0001	Berhubungan signifikan	10,000	Lebih patuh
Pengetahuan	0,687	Tidak berhubungan	0,679	Tidak berhubungan
Pendapatan	0,106	Tidak berhubungan	2,265	Tidak berhubungan
Peran Pemerintah/Tokoh Masyarakat	0,012	Berhubungan signifikan	3,415	Lebih patuh
Sarana dan Prasarana	1,000	Tidak berhubungan	1,045	Tidak berhubungan

Berdasarkan Tabel 4.1, diketahui bahwa dari lima variabel independen yang diteliti, hanya dua variabel yang menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah, yaitu tingkat pendidikan dan peran pemerintah atau tokoh masyarakat. Variabel pendidikan memiliki nilai *p-value* sebesar 0,0001 dengan *POR* sebesar 10,000, yang menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang kepatuhan sepuluh kali lebih besar dibandingkan dengan responden berpendidikan rendah. Sementara itu, peran pemerintah atau tokoh masyarakat memiliki *p-value* sebesar 0,012 dan *POR* sebesar 3,415, yang menunjukkan bahwa adanya peran aktif dari pemerintah atau tokoh masyarakat meningkatkan peluang kepatuhan masyarakat lebih dari tiga kali lipat.

Sebaliknya, variabel tingkat pengetahuan, tingkat pendapatan, serta sarana dan prasarana persampahan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat, karena nilai *p-value* masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah tidak semata-mata ditentukan oleh aspek kognitif, ekonomi, atau ketersediaan fasilitas, melainkan juga oleh faktor struktural dan sosial yang lebih luas.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada interpretasi hasil penelitian dengan mengaitkannya pada teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu. Selain itu, pembahasan juga mencerminkan posisi teoritis peneliti dalam memahami fenomena kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di wilayah perkotaan.

4.2.1 Keterbatasan Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, secara metodologis tidak ditemukan keterbatasan penelitian yang bersifat mendasar, baik dari segi desain penelitian, pendekatan yang digunakan, maupun instrumen pengumpulan data. Desain penelitian telah disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan instrumen kuesioner telah melalui proses penyusunan yang sistematis sehingga mampu mengukur variabel yang diteliti. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya di lapangan, penelitian ini tetap menghadapi sejumlah hambatan teknis yang berpotensi mempengaruhi proses pengumpulan data dan kedalaman informasi yang diperoleh.

Hambatan utama yang dihadapi peneliti adalah keterbatasan tempat dan waktu dalam pelaksanaan penelitian. Lokasi penelitian yang berada di kawasan tepi jalan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi menyebabkan kondisi lapangan menjadi kurang kondusif. Arus lalu lintas yang padat, kebisingan lingkungan, serta aktivitas masyarakat yang berlangsung secara simultan membuat proses interaksi antara peneliti dan responden tidak selalu berjalan optimal. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi fokus responden dalam menjawab pertanyaan, sehingga kualitas jawaban yang diberikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, waktu masyarakat dalam melakukan aktivitas pembuangan sampah yang tidak menentu juga menjadi kendala tersendiri. Tidak semua responden dapat dijumpai pada waktu yang sama atau dalam kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan wawancara maupun pengisian kuesioner secara nyaman. Sebagian responden terburu-buru karena aktivitas pekerjaan atau keperluan lain, sehingga waktu yang tersedia untuk memberikan informasi menjadi terbatas. Hal ini berpotensi mempengaruhi kelengkapan dan kedalaman jawaban yang diberikan oleh responden.

Kondisi lingkungan penelitian yang ramai dan kurang mendukung juga turut mempengaruhi tingkat kenyamanan responden. Beberapa responden terlihat kurang leluasa dalam menyampaikan pendapat atau pengalaman pribadi terkait perilaku pembuangan sampah, terutama ketika penelitian dilakukan di ruang terbuka yang dapat diakses oleh orang lain. Situasi tersebut memungkinkan terjadinya bias informasi, di mana responden cenderung memberikan jawaban yang bersifat normatif atau sosial-desirabel, bukan berdasarkan perilaku nyata yang dilakukan sehari-hari.

Hambatan-hambatan tersebut berpotensi mempengaruhi kedalaman informasi yang diperoleh peneliti, khususnya dalam menggali aspek sikap dan motivasi responden secara lebih mendalam. Meskipun demikian, secara keseluruhan data yang terkumpul masih memenuhi syarat untuk dianalisis secara statistik dan mampu memberikan gambaran yang representatif mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tetap relevan untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan penelitian lanjutan di masa mendatang.

4.2.2 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Hasil uji statistik memperoleh *nilai p-value* sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan dan kepatuhan masyarakat. Selain itu, nilai *Prevalence Odds Ratio (POR)* sebesar 10,000 menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang sepuluh kali lipat untuk berperilaku patuh dalam membuang sampah dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Secara konseptual, pendidikan merupakan proses pembentukan sikap, nilai, dan perilaku individu yang berlangsung secara sistematis melalui kegiatan pengajaran dan

pembelajaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan. Pengertian ini menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan karakter, sikap, dan tanggung jawab sosial individu dalam kehidupan bermasyarakat.

Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani manusia agar dapat mencapai kesempurnaan hidup yang selaras dengan alam dan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan sejak dini. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki cara pandang yang lebih rasional dan kritis terhadap dampak perilaku manusia terhadap lingkungan, termasuk dalam hal pembuangan sampah.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2019) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara tingkat pendidikan dan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah, dengan nilai *p-value* sebesar 0,0005. Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menerima, memahami, dan mengolah informasi terkait pengelolaan sampah yang baik dan benar. Masyarakat dengan pendidikan rendah cenderung kurang memahami dampak jangka panjang dari perilaku membuang sampah sembarangan terhadap kesehatan dan lingkungan.

Sebaliknya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kemampuannya dalam menyerap informasi, memahami risiko lingkungan, serta menginternalisasi nilai-nilai kebersihan dan kesehatan lingkungan ke dalam perilaku sehari-hari (Putra, 2020). Pendidikan juga mempermudah individu dalam menerima program sosialisasi, penyuluhan, maupun kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, sehingga meningkatkan peluang terbentuknya perilaku patuh.

Menurut peneliti, tingkat pendidikan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk kepatuhan terhadap pengelolaan sampah. Pendidikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tetapi juga membentuk pola pikir kritis, kesadaran kolektif, serta sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah perlu diiringi dengan strategi edukatif yang berkelanjutan, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal, maupun melalui kegiatan penyuluhan berbasis komunitas. Dengan demikian, pendidikan dapat berfungsi sebagai fondasi utama dalam menciptakan perilaku masyarakat yang lebih peduli dan patuh terhadap pengelolaan lingkungan.

4.2.3 Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kepatuhan Masyarakat

Berbeda dengan variabel tingkat pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Hasil uji statistik memperoleh nilai *p-value* sebesar 0,687 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$, sehingga secara statistik dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pengetahuan dan kepatuhan masyarakat. Nilai *Prevalence Odds Ratio (POR)* sebesar 0,679 juga mengindikasikan bahwa tingkat pengetahuan bukan merupakan faktor dominan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah.

Pengetahuan merupakan hasil dari proses penginderaan manusia terhadap suatu objek melalui pancaindra, yang kemudian diolah menjadi pemahaman, informasi, dan kesadaran (Notoatmodjo, 2017). (Mubarak, 2020) menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman dan akan terus berkembang seiring dengan bertambahnya

pengalaman hidup seseorang. Dalam kerangka teori perilaku kesehatan, pengetahuan sering dianggap sebagai prasyarat awal terbentuknya sikap dan perilaku yang positif, termasuk perilaku menjaga kebersihan lingkungan.

Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki masyarakat tidak selalu terimplementasi dalam bentuk perilaku patuh. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik (*knowledge-practice gap*), yaitu situasi ketika individu mengetahui suatu informasi atau aturan, tetapi tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang memahami dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan belum tentu membuang sampah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Beberapa faktor dapat menjelaskan fenomena ini, antara lain rendahnya kepedulian lingkungan, lemahnya pengawasan dari pihak berwenang, serta kurangnya sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran. Selain itu, faktor kebiasaan dan norma sosial yang telah terbentuk dalam masyarakat juga berpengaruh kuat terhadap perilaku individu. Ketika membuang sampah sembarangan telah menjadi praktik yang dianggap biasa, maka pengetahuan yang dimiliki tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku tersebut.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan dalam pembuangan sampah. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, seperti penguatan norma sosial, peningkatan pengawasan, penegakan sanksi, serta peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, pengetahuan dapat terinternalisasi menjadi sikap dan akhirnya diwujudkan dalam perilaku yang patuh.

4.2.4 Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Kepatuhan Masyarakat

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Nilai *p-value* sebesar 0,106 yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat hubungan yang bermakna antara tingkat pendapatan dan kepatuhan masyarakat. Nilai *POR* sebesar 2,265 mengindikasikan bahwa meskipun terdapat perbedaan peluang kepatuhan, namun perbedaan tersebut tidak cukup kuat secara statistik untuk dinyatakan signifikan.

Pendapatan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hasil kerja atau usaha yang diterima seseorang dalam periode tertentu. Pendapatan sering dikaitkan dengan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk penyediaan sarana pendukung perilaku sehat. Menurut *WHO (World Health Organization, 2016)*, sumber daya ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang, karena keterbatasan ekonomi dapat menjadi hambatan dalam mengakses fasilitas atau sarana tertentu.

Namun, dalam konteks penelitian ini, tingkat pendapatan tidak menjadi faktor penentu utama dalam perilaku kepatuhan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebagian besar masyarakat telah menyediakan tempat sampah sendiri di rumah masing-masing. Bagi masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah, keterbatasan ekonomi tidak menjadi alasan untuk tidak patuh, karena mereka dapat memanfaatkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai sebagai tempat sampah sementara.

Temuan ini menunjukkan bahwa perilaku kepatuhan dalam pembuangan sampah lebih dipengaruhi oleh kesadaran, kebiasaan, dan nilai yang dianut masyarakat, bukan semata-mata oleh kemampuan ekonomi. Masyarakat dengan pendapatan tinggi maupun rendah memiliki peluang yang relatif sama untuk berperilaku patuh atau tidak patuh, tergantung pada sikap dan kebiasaan yang terbentuk dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut peneliti, hasil ini mengindikasikan bahwa intervensi peningkatan kepatuhan masyarakat sebaiknya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi lebih diarahkan pada pembentukan perilaku, peningkatan kesadaran lingkungan, serta

penguatan regulasi dan pengawasan. Dengan demikian, kepatuhan masyarakat dapat terwujud secara lebih merata tanpa bergantung pada kondisi ekonomi individu.

4.2.5 Hubungan Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dengan Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dan tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Nilai *p-value* sebesar 0,012 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ menunjukkan adanya hubungan yang bermakna secara statistik. Nilai *POR* sebesar 3,415 mengindikasikan bahwa masyarakat yang merasakan adanya peran aktif dari pemerintah atau tokoh masyarakat memiliki peluang lebih dari tiga kali lipat untuk berperilaku patuh dibandingkan dengan masyarakat yang tidak merasakan peran tersebut.

Pemerintah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam suatu wilayah. Max Weber mendefinisikan pemerintah sebagai pihak yang memiliki legitimasi untuk menggunakan kekuasaan secara sah dalam menegakkan aturan dan ketertiban sosial. Dalam konteks pengelolaan sampah, pemerintah memiliki peran strategis mulai dari penyusunan kebijakan, penyediaan sarana dan prasarana, sosialisasi aturan, hingga pengawasan dan penegakan hukum.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Napis Ifikti, 2020), (Putra, 2020) ,(Oswari, 2019) yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara peran pemerintah dan tokoh masyarakat dengan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sosialisasi yang intensif, keterlibatan tokoh masyarakat, serta adanya pengawasan yang konsisten terbukti mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membuang sampah sesuai aturan.

Tokoh masyarakat memiliki posisi strategis sebagai panutan dan agen perubahan di tingkat lokal. Kehadiran tokoh masyarakat dalam menyampaikan pesan lingkungan, memberikan contoh perilaku yang baik, serta mengingatkan masyarakat secara persuasif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pemerintah. Ketika pesan yang disampaikan pemerintah diperkuat oleh tokoh masyarakat yang dihormati, maka tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat cenderung meningkat.

Menurut peneliti, peran pemerintah dan tokoh masyarakat tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi atau sosialisasi, tetapi juga mencakup fungsi pengawasan, penegakan aturan, serta pemberian keteladanan. Konsistensi dalam penegakan sanksi dan keberlanjutan program sosialisasi menjadi faktor kunci dalam membentuk perilaku patuh masyarakat. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah dan tokoh masyarakat merupakan elemen penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

4.2.6 Hubungan Sarana dan Prasarana dengan Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana persampahan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat, dengan nilai *p-value* sebesar 1,000 dan *POR* sebesar 1,045. Sarana dan prasarana menurut KBBI merupakan alat dan fasilitas yang menunjang terlaksananya suatu proses.

Meskipun teori *Lawrence Green* dan *WHO (World Health Organization, 2016)* menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas merupakan faktor pendukung perilaku, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana dan prasarana saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan. Masyarakat telah memiliki tempat sampah di rumah masing-masing, namun hal tersebut tidak secara otomatis mendorong perilaku patuh dalam membuang sampah pada tempat yang semestinya.

Menurut peneliti, temuan ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana hanya berfungsi sebagai faktor pendukung, bukan faktor penentu. Tanpa adanya pengawasan, edukasi, dan peran sosial yang kuat, fasilitas yang tersedia tidak akan dimanfaatkan secara optimal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tahun 2024. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, namun tidak seluruh variabel yang diteliti menunjukkan hubungan yang bermakna secara statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk berperilaku patuh dibandingkan masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku individu terhadap pengelolaan lingkungan, khususnya dalam praktik pembuangan sampah sesuai aturan.

Sebaliknya, tingkat pengetahuan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara pengetahuan dan praktik, di mana pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai dampak sampah dan aturan pengelolaannya belum sepenuhnya diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Faktor kebiasaan, norma sosial, serta lemahnya pengawasan diduga menjadi penyebab utama mengapa pengetahuan tidak selalu berujung pada perilaku patuh.

Variabel tingkat pendapatan juga tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi bukan menjadi faktor penentu utama dalam perilaku pembuangan sampah. Masyarakat dengan pendapatan rendah maupun tinggi memiliki peluang yang relatif sama dalam bersikap patuh, karena keterbatasan ekonomi dapat disiasati melalui penyediaan sarana sederhana seperti pemanfaatan barang bekas sebagai tempat sampah.

Penelitian ini juga menemukan bahwa peran pemerintah dan tokoh masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan masyarakat. Peran aktif pemerintah dan tokoh masyarakat dalam bentuk sosialisasi, pengawasan, serta keteladanan terbukti mampu meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat lokal, secara konsisten dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai upaya peningkatan kepatuhan masyarakat dalam pembuangan sampah di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Bagi pihak pemerintah daerah dan tokoh masyarakat, disarankan untuk memperkuat penegakan Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah secara konsisten dan berkelanjutan. Pemberian sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran pembuangan sampah diharapkan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dalam penyediaan serta pemerataan sarana dan prasarana persampahan. Penyediaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang legal dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam mendukung perilaku patuh

masyarakat. Sosialisasi yang berkelanjutan mengenai tata cara pembuangan sampah, jam operasional, serta dampak lingkungan juga perlu terus dilakukan dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima.

Bagi masyarakat Kecamatan Marpoyan Damai khususnya Kelurahan Tengkerang Barat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan mematuhi aturan pembuangan sampah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru. Kepatuhan masyarakat dalam membuang sampah pada tempat dan waktu yang sesuai merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan keterlibatan aktif lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media lokal dalam membangun budaya disiplin pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(5), 179–211.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. . *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- BPS Kota Pekanbaru. (2022). *Kecamatan Marpoyan Damai dalam angka 2022*. BPS Kota Pekanbaru.
- Citron, S. , S. J. & Rachmi. (2023). Pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap kesehatan lingkungan. *J. Urnal Kesehatan Lingkungan*, 15(2), 101–110.
- Glanz, K. , R. B. K. , & V. K. (2020). *Health behavior and health education: Theory, research, and practice (4th ed.)*. Jossey-Bass.
- Hellen, I. & N. (2020). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–58.
- Manik, K. E. S. , dkk. (2021). *Pengelolaan lingkungan hidup*. Djambatan.
- Mubarak, W. I. (2020). *Promosi kesehatan untuk kebidanan*. Salemba Medika.
- Napis Ifikti, H. W. , & I. V. G. (2020). Peran pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengelolaan sampah. . *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(3), 201–209.
- Notoatmodjo, S. (2017). *Promosi kesehatan dan perilaku kesehatan*. Rineka Cipta. 112–134.
- Oswari, T. (2019). Dampak lingkungan akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal. . *Jurnal Lingkungan Hidup*, 7(1), 33–41.
- Putra, R. (2020). Pendidikan lingkungan dan perubahan perilaku masyarakat. . *Jurnal Pendidikan Dan Lingkungan*, 5(2), 87–95.
- Rahman, M. (2019). Hubungan tingkat pendidikan dengan perilaku pengelolaan sampah rumah tangga. . *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 12–19.
- World Health Organization. (2016). *Safe management of wastes from health-care activities (2nd ed.)*. WHO Press.